



## PENERAPAN MANAJEMEN PEMBIAZAAN PENDIDIKAN (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Bandar Lampung )

**1Rusyda Ulfa Aryani, 2Warmidianti, 3Novita Isdasari, 4Nurul Hidayati Murtafiah**

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email : <sup>1</sup>farraskharani@gmail.com, <sup>2</sup>warmidianty@gmail.com, <sup>3</sup>novitaisdasari17@gmail.com,  
<sup>4</sup>nurul752.nhm@gmail.com

Received: Oktober 2022

Accepted: November 2022

Published: Desember 2022

### Abstract :

Educational institutions have a heavy responsibility in realizing the lofty ideals of educating the nation's life and forming a virtuous national personality, so that education can be defined as an important factor to realize quality human resources (HR). The purpose of this study is to describe the financial management of education in SMP Negeri 3 Bandar Lampung city. The research used is descriptive qualitative which refers to the explanation of Education Financing Management. By focusing this research, the authors will use descriptive enelitian methodology through a qualitative approach. The subjects of this study were principals, treasures, parent teachers and school committees, Data collection was used through interviews, observations and documentation . The results showed that (1) Finacial planning education was made a 1-year budget.(2) The implementation of financing shall be carried out in accordance with the budget and reported every three months. (3) Monitoring and evaluation of education financing shall be carried out periodically.

**Keywords :** *Education financing management, First Menegah School*

### Abstrak :

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab berat dalam mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan mem- bentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur, sehingga pendidikan dapat didefinisikan sebagai faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. uan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan keuangan Pendidikan di SMP Negeri 3 kota Bandar Lampung. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada penjelasan tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Dengan memfokuskan penelitian ini, penulis akan menggunakan metodelogienelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, harta, guru orang tua dan komite sekolah, Pendataan itu digunakan melalui wawancara, observasi, dan dekumentasi . Hasil penelitian menunjukkan (1) pendidikan perencanaan Finacial dibuat anggaran 1 tahun. (2) Pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan RAPBS dan dilaporkan setiap tiga bulan. (3) Pemantauan dan evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala.

**Kata Kunci:** *Manajemen pembiayaan pendidikan, Sekolah Menegah Pertama.*

## PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab berat dalam mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan mem- bentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur, sehingga pendidikan dapat didefinisikan sebagai faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan sarana strategis guna peningkatkan mutu sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia menjadi modal dasar sekaligus kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia(Ahyani, Abduloh, dan Tobroni 2021).

Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sekaligus merupakan potensi sumber daya pendidikan. Faktor internal berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. Sedangkan, faktor eksternal berkenaan dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial-budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses Pendidikan(Sagala 2015).

Dinamika pendidikan dilihat dari segi pembiayaan pendidikan berhubungan dengan:(1)jumlah pembiayaan sekolah swasta; (2)penggajian staf pengajaran;(3)pembiayaan dan penerimaan pendapatan; dan (4)kembalian dari pembiayaan pendidikan yang meningkat. Indiyantomenyatakan bahwa kebijakan pendidikan masih diarahkan pada empat tema kebijakan, yaitu peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutupendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi pendidikan. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua kalangan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi," Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara". Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya

pendidikan dasar. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan(Santi dan Aini 2022).

Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya pendidikan itu tidak saja dirasakan pada saat presiden atau pemerintah menetapkan besarnya biaya pembangunan pendidikan pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi dan relevansi pendidikan. Semua pemikiran ini akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia(Mujayaroh dan Rohmat 2020).

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tetap saja biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan.

Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga

pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan. Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar(Usman 2016).

Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang disebutkan bahwa "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan" serta pasal 9 yang berbunyi "masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran. Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang

daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya(Robikhah dan Sari 2021).

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan.

Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana

BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP). Menurut Wijaya dalam jurnal penilitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen

Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan" menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor Pendidikan, tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri. Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan sekolah negeri sangat berbeda. Di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung contohnya, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang besar dan maju di Kota Bandar Lampung. Di sekolah ini kegiatan Ekstrakurikuler dan Mutu Pendidikan didalam maupun luar sekolah dapat berjalan dengan baik dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, pemberian reward pada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun nonakademik dalam berbagai kategori di akhir tahun pelajaran, pemberian reward pada guru dan karyawan yang berprestasi, dan lain sebagainya. Untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah tersebut tentunya membutuhkan biaya yang memadai yang besarnya lebih besar dari sekolah menengah pertama lainnya. Dan pembiayaan pada sekolah SMP Negeri 3 ini tidak semuanya kebutuhan dapat terpenuhi baik dalam ketersediaan bahan-bahan pelajaran dan kegiatan Penunjang lainnya. Selain masalah pembiayaan diatas tidak hanya besarnya dana yg diberikan ketepatan dalam mengalokasikan dana-dana tersebut apakah sudah tepat guna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang manajemen pembiayaan pendidikan sekolah di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung. Sehingga dalam hal ini, penulis menulis artikel

## **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung”**

Berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung; (2) Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung; (3) Untuk Mendeskripsikan Monitoring Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung; (4) Untuk Mendeskripsikan Hambatan dan Dukungan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada penjelasan tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Dengan memfokuskan penelitian ini, penulis akan menggunakan metodelogipenelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu, manusia, suasana yang diamati, dan dokumen-dokumen. Subyek dalam penelitian ini sebagai sumber data dan sumber data manusia adalah orang atau sumber yang dapat memberikan informasi tentang Manajemen Pembiayaan Sekolah. Informan penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru dan staf tata usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, melakukan analisis data melalui teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan..

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok: merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran, yaitu: (1) asas kecermatan; (2) asas terperinci; (3) asas keseluruhan; (4) asas keterbukaan; (5) asas periodik; (6) asas pembinaan. Masalah-masalah terkait dengan penyusunan RAPBS. Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharus-kannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu(Iqbal dkk. 2022)

Penyusunan anggaran dan pendapatan rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan beberapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, berdasarkan dari dana yang tersedia dan melaksanakan kegiatan tersebut, bukan berdasarkan dari dana yang tersedia dan bagaimana dan tersebut dihabiskan. Penyusunan rencana anggaran pendapatan (RAP) dan rencana anggaran belanja (RAB), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: (1) sumber pembiayaan; (2) penge- luaran untuk kegiatan belajar mengajar, penggadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, Honorarium dan kesejahteraan.

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 056/U/2001 menyetujui penyelenggaran pendidikan disekolah meliputi: (1) Pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktik untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2) Pelayanan yang bersifat menunjang untuk operasional ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) Pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium dan keterampilan; (4) Pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti saran administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah, dan lingkungan; (5) Penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas, dan air; (6) Perjalanan dinas kepala sekolah; (7) Pelayanan masyarakat, pemberdayaan komite sekolah, kegiatan sosial; (8) Penyelenggaran lomba yang dikuti siswa atau guru; (9) Pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar; (10) Penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorarium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang kegiatan. Berdasarkan komponen penyelenggara pendidikan tersebut, tiap sekolah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran(Azhari dan Kurniady 2016)

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program. Evaluasi adalah Kegiatan yang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja atau kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/ dampak yang telah ditetapkan.

Monitoring Evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan guna memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi konsumen dalam hal

ini siswa dan wali murid yang bersangkutan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) kesuaian yang dicapai baik bidang terkait, administratif maupun operasional dengan peraturan yang ditetapkan; (3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efektif dan efisien; (4) sistem yang lain ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna.

Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring lebih bersifat evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan program dan Melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten(Munir 2013).

Komponen utama yang akan dimonitor adalah: alokasi dana sekolah, penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, dan administrasi keuangan. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan, sudah sesuai dengan juknis atau belum sehingga untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah di tuntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksanaan administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggung jawaban serta pengadministrasian keuangan. Hambatan yang sering terjadi adalah sering keterlambatan dana masuk (cair) sehingga untuk proses pembelajaran siswa, ekstra kulikuler dan kegiatan lainnya menjadi terhambat. Proses pencairan dana yang sering terlambat membuat sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk digunakan siswa. Selain itu belum adanya kewenangan sepenuhnya yang diberikan bendahara sekolah dalam mengelola dana pendidikan menyebabkan sekolah perlu menunggu dana cair kemudian baru digunakan untuk pihak sekolah. Selain itu juga dana yang digunakan harus berdasarkan juklak bukan kebutuhan sekolah sebenarnya sebenarnya sehingga dana BOS cederung terbatas untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa.

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah, pembiayaan sekolah yang bersumber dari pemerintah, seperti dana

BOS diawasi oleh Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung. Tujuan pengawasan keuangan ini adalah untuk menjaga dan mendorong agar; (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah didiskusikan; (b) pelaksanaan sesuai dengan peraturan instruksi serta atas dasar yang telah ditentukan; (c) kesulitan dan kelemaan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi; (d) pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien, efektif dan tepatwaktu(Sonedi, Jamalie, dan Majeri 2017).

Pengawasan yang dilakukan untuk melihat apakah dana tersebut sudah tepat dalam penggunaannya dan administrasi keuangannya sudah tertib atau belum dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ciri-ciri pengawasan yang baik adalah; (a) menemukan fakta pelaksanaan tugas; (b) mencegah penyimpangan dan penyeleweng susunan rencana; (c) diarahkan pada masa sekarang; (d) meningkatkan efisiensi; (e) menemukan kesalahan; (f) membimbing pelaksanaan melaksanakan tugas.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemberian di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, dan pengawasan juga tidak terlalu ketat, karena bendahara yang mengatur laporan ke Dinas Pendidikan, kemudian untuk pengawasan external yang dilakukan oleh inspektorat dilakukan tiga kali dalam setahun, dan instansi yang berwenang. Bagian akhir dari pengelolaan BOS adalah penyusunan laporan Pelaporan keuangan BOS merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS terhadap publik. Transparansi keuangan diperlukan untuk meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Dana yang bersumber dari sekolah di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung, dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS penggunaannya kurang disampaikan atau dialokasikan kepada masyarakat karena pada pumumnya masyarakat tidak mengetahui berapa penerimaan dana BOS dan untuk apa saja kegunaannya, tetapi masyarakat juga tidak terlalu mempermasalakan hal tersebut itu mungkin terjadi karena masyarakat percaya bahwa penggunaan dana tersebut sudah benar(Mufid 2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pemberian di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung selalu mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Sumber pemberian yang berasal dari pemerintah, yaitu dana rutin dan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pengalokasian, realisasi penempaan dan tanggung jawabnya berdasarkan petunjuk dan buku pedoman penggunaan BOS bukan berdasarkan

kebutuhan sekolah1.Perencanaan Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 3 Bandar Lampung disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan bendahara, dewan guru, pengurus dan ketua komite serta wali murid mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran, Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan financial, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetuju bersama, dengan melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengesahan Anggaran yang kemudian dirangkum dalam RAPBS.2.Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan anggaran pendidikan meliputi: (a) melakukannya analisis internal dan eksternal terhadap potensi sumber dana; (2) mengidentifikasi, mengelompokan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; (c) menetapkan sumber dana musyawarah, mengalang partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. 3.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung, meliputi: (a) Perencanaan anggaran dana; (b) Pelaksanaan pengelolaan dana; (c) Evaluasi penggunaan dana BOS dilakukan secara insidental dalam bentuk pengawasan melekat oleh kepala sekolah dan monitoring internal dilakukan oleh tim manajemen BOS Kota Bandar Lampung, dan Pelaporan BOS di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara per bulan, triwulan, dan per tahun dengan format penyusunan laporan mengikuti petunjuk penyusunan laporan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik terutama terhadap orang tua siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Ulpha Lisni, dan Dedy Achmad Kurniady. 2016. "MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 23 (2). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>.
- Iqbal, Muhammad, Muhammad Kamal Akbar Javan, Niken Sastri Nurunnihal, Nurchayanti Nurcahyanti, Rizki Kurnia Ningsih, Siti Fatimah, Wardah Khumairah Manurung, Winda Sari Sinaga, dan Yustika Widya Sazlina. 2022. "Peran Dan Fungsi Yayasan At-Thoharoh Dalam Mengembangkan Keagamaan Masyarakat Di Nagori Manik Maraja." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6 (1): 94-100. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5044>.
- Mufid, Moh Mundzirul. 2015. "MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MAN 3 KEDIRI." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 2 (2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/37/article/view/14634>.
- Mujayaroh, Mujayaroh, dan Rohmat Rohmat. 2020. "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan." *Arfannur* 1

- (1): 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>.
- Munir, Ahmad. 2013. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam." *At-Ta'dib* 8 (2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.
- Robikhah, Aridlah Sendy, dan Riska Dwita Sari. 2021. "PERAN KEPEMIMPINAN KH. ABDULLAH SHIDDIQ DALAM PEMBENTUKKAN KARAKTER SANTRI PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM GLAGAH LAMONGAN." *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5 (1): 48–63. <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i1.616>.
- Sagala, Syaiful. 2015. "MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN." *JURNAL TARBIYAH* 22 (2). <https://doi.org/10.30829/tar.v22i2.37>.
- Santi, Dewi, dan Yurika Aini. 2022. "Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Menurut Nurcholis Madjid." *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education* 3 (1): 1–19.
- Sonedi, Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri Majeri. 2017. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat." *FENOMENA*, Juni, 25–46. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>.
- Usman, Husaini. 2016. "Peran Baru Administrasi Pendidikan: Dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8 (1). <https://doi.org/10.17977/jip.v8i1.512>.